



Manado Post

Jumat, 8 November 2024

Polres Boltim Didesak Periksa Dana Hibah Pilkada

25,2 Miliar Milik KPU dan Bawaslu Harus Dibeber

EDITOR : BALLADEWA SETLIGHT (UKW 17394)

BOLTIM — Dana hibah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sebesar 25,2 miliar rupiah, yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Boltim, mendapat sorotan tajam dari masyarakat.

Dana ini terbagi antara KPU Boltim yang mendapatkan alokasi sebesar 18,5 miliar rupiah, dan Bawaslu Boltim yang menerima 6,7 miliar rupiah. Meskipun jum-

lahnya signifikan, dampak penggunaan dana tersebut dinilai belum optimal, terutama dalam hal partisipasi publik dan sosialisasi Pilkada yang seharusnya masif dan terasa di masyarakat.

Seorang warga Boltim yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan keresahannya. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran besar ini karena, menurutnya, gema Pilkada di Boltim nyaris tak terasa. "Seharusnya, dengan dana

yang begitu besar, KPU dan Bawaslu aktif mengedukasi dan melibatkan masyarakat dalam proses Pilkada. Sosialisasi di lapangan minim, dan kehadiran KPU serta Bawaslu seperti tidak dirasakan," ungkapnya.

Ia juga mendesak pihak kepolisian, khususnya Polres Boltim, untuk mengawasi dan mengaudit pemanfaatan dana tersebut agar tidak disalahgunakan. "Kami tidak ingin melihat anggaran ini hanya jadi angka-angka besar di

atas kertas, tapi tidak membawa dampak nyata. Kami khawatir dengan anggaran besar ini, namun rendahnya partisipasi pemilih bisa mengindikasikan bahwa dana ini tidak digunakan secara efisien. Transparansi harus menjadi prioritas, apalagi untuk lembaga seperti KPU dan Bawaslu," tambahnya.

KPU Boltim mendapat alokasi terbesar, yaitu 18,5 miliar rupiah. Angka ini seharusnya mampu menunjang berbagai kegiatan penting seperti sosialisasi yang masif kepada calon pemilih, pendediaan fasilitas penunjang Pilkada. Namun, kritik mengemuka karena kegiatan sosialisasi di lapangan dinilai minim. Tidak

banyak warga yang mengetahui tahapan-tahapan Pilkada atau memahami visi dan misi kandidat, yang seharusnya menjadi fokus KPU.

"Jika dana sebesar 18,5 miliar rupiah tidak berdampak pada kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih, lalu untuk apa sebenarnya dana ini? KPU Boltim perlu menjelaskan kepada publik bagaimana detail anggaran ini dibelanjakan, apakah untuk logistik, honor petugas, atau kegiatan lain, serta bukti transparansi itu harus disampaikan kepada masyarakat. Begitu juga anggaran Bawaslu Boltim, semua harus diungkap kemana saja aliran dana ini digunakan," kunci warga Boltim tersebut.

Sementara itu, Desiana Samosir, Tim Ahli Indeks Keterbukaan Informasi Pusat (IKIP) 2024, dengan tegas meminta agar KPU dan Bawaslu Boltim mematuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Menurut Desiana, sebagai badan publik, Bawaslu dan KPU Boltim wajib membuka laporan keuangannya kepada publik, terutama terkait anggaran sebesar Rp 25,2 miliar tersebut. "Bawaslu dan KPU Boltim harus patuh terhadap UU KIP dan merinci dengan jelas penggunaan anggaran ini. Dana sebesar Rp 25,2 miliar dari APBD bukan jumlah kecil, dan publik berhak tahu bagaimana dana itu diguna-

kan. Transparansi merupakan fondasi dari kepercayaan publik," tegasnya.

Desiana juga menantang KPU dan Bawaslu Boltim untuk merilis rincian penggunaan anggaran secara terbuka dan terperinci. Ia mengingatkan, ketertutupan badan publik dalam pengelolaan anggaran justru berpotensi menimbulkan dugaan adanya penyimpangan. "Kita tantang Bawaslu dan KPU Boltim untuk transparan. Mereka harus merinci bagaimana setiap rupiah dari Rp 25,2 miliar tersebut dialokasikan. Jika mereka tidak segera membuka laporan keuangan, itu bisa menimbulkan asumsi negatif dan menurunkan kepercayaan publik," tandasnya. (*)